

**IMPLEMENTASI KERJASAMA BILATERAL KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM RI DAN *UNITED STATE AGENCY
INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)* DALAM
MEMPERKUAT SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAH ANTI
KORUPSI DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh :

Muhammad Iffat Mu'afa

07041381924206

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

**Implementasi Kerjasama Bilateral Pemerintah Indonesia Dan
United States Agency International Development (USAID) dalam
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Anti Korupsi di Indonesia**

PROPOSAL SKRIPSI

Disusun oleh:

Muhammad Iffat Mu'afa
07041381924206

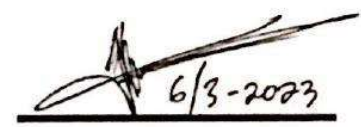
Pembimbing I

Dra. Retno Susilowati, MM
NIP. 195905201985032003



Pembimbing II

Khairunnas, S.IP., M.I.Pol
NIDN. 0011059403



6/3-2023

Disetujui oleh,
Ketua Jurusan



7/3 2023

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**"Implementasi Kerjasama Bilateral Kementerian Hukum dan HAM RI
United State Agency International Development (USAID) Dalam Memperkuat
Sistem Tata Kelola Pemerintah Anti Korupsi di Indonesia"**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Muhammad Iffat Mu'afa

07041381924206

Pembimbing I

Dra. Retno Susikowati, MM

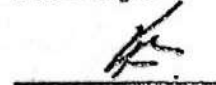
NIP. 195905201985032003

Pembimbing II

Khairunnas, S.IP., M.I.Pol


NIDN. 0011059403

Tanda Tangan

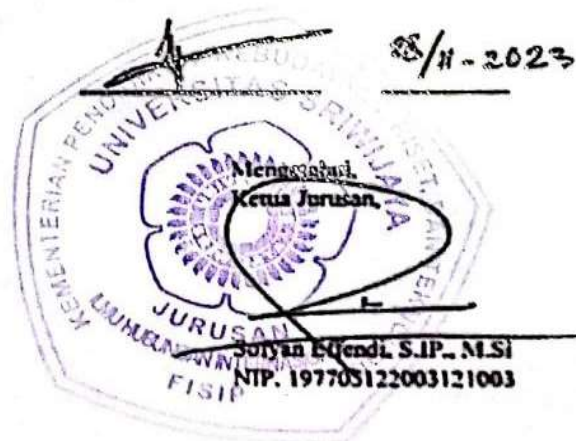


Tanggal

22/11-2023



28/11-2023



LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI

“Implementasi Kerjasama Bilateral Kementerian Hukum dan HAM RI dan *United State Agency International Development (USAID)* Dalam Memperkuat Sistem Tata Kelola Pemerintah Anti Korupsi di Indonesia”

Skripsi

Oleh :

**Muhammad Iffat Mu'afa
07041381924206**

Telah dipertahankan di depan penguji Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pada tanggal 19 Desember 2023

Pembimbing :

Pembimbing I

Dra. Retno Susilowati, MM

NIP. 195905201985032003

Tanda Tangan



Pembimbing II

Khairunnas, S.IP., M.I.Pol

NIDN. 0011059403



Penguji :

1. Cynthia Azhara Putri, S.H., M.Kn

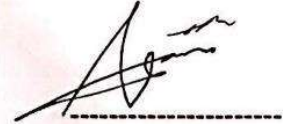
NIDN 0009029110

Tanda Tangan



2. Muh Nizar Sohyb, S.IP., M.A

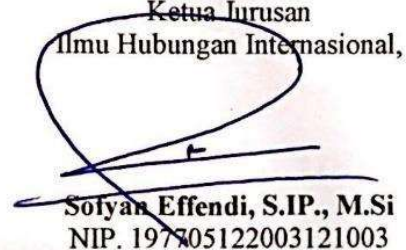
NIP 199301072023211022



Mengetahui,



**Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional,**



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Iffat Mu'afa
NIM : 07041381924206
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang / 09 Februari 2001
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Implementasi Kerjasama Bilateral Kementerian Hukum dan HAM RI dan *United State Agency International Development (USAID)* Dalam Memperkuat Sistem Tata Kelola Pemerintah Anti Korupsi di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.

Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang,
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Iffat Mu'afa
NIM. 07041381924206

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya Persembahkan Skripsi Ini Untuk Yang Selalu Bertanya :
“Kapan skripsimu selesai?”

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukannya pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai?

Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus, dan percayalah, alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

Terima Kasih.

Muhammad Iffat Mu'afa

ABSTRAK

Amerika Serikat menjadikan demokrasi sebagai nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hingga nilai demokrasi pun disebarkan melalui lembaga bantuan asing disebut USAID (*United States Agency for International Development*), bertujuan untuk membantu negara-negara berkembang dalam pembangunan sosial termasuk Indonesia. Salah satu Program USAID yang berada di Indonesia adalah CEGAH sebagai upaya anti korupsi, bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI. Peneliti menganalisis implementasi Proyek CEGAH di Indonesia sebagai upaya pembangunan sosial sesuai dengan misi Amerika Serikat. Untuk memahami fenomena tersebut, konsep kebijakan luar negeri oleh K.J. Holsti dan konsep Demokrasi oleh Larry Diamond digunakan untuk melihat skala keberhasilan kebijakan tersebut. Selain itu, konsep korupsi dari Max Weber juga digunakan untuk memahami budaya korupsi yang berkembang di masyarakat. Penelitian kualitatif ini mendapatkan data melalui pihak terkait seperti USAID dan Kemenkumham. Data sekunder lainnya diperoleh dari jurnal, buku dan media online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga tujuan yang ingin dicapai melalui Proyek CEGAH, inisiatif masyarakat terhadap akuntabilitas meningkat pesat, sedangkan efektivitas sektor keadilan dan lembaga pencegahan korupsi di Indonesia mengalami sedikit kemajuan.

Kata Kunci : Amerika Serikat, Anti Korupsi, *USAID*, Indonesia, CEGAH

Pembimbing 1

Dra. Retno Susilowati,MM
NIP. 195905201985032003

Pembimbing 2

Khairunnas, S.IP., M.I.Pol
NIDN. 0011059403

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Sofyan Effendi, S.IP., M.SI
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

The United States of America makes democracy as a fundamental value in the life of the nation and state, so that the value of democracy is spread through a foreign aid agency called USAID (United States Agency for International Development), aiming to help developing countries in social development including Indonesia. One of the USAID programs in Indonesia is CEGAH as an anti-corruption effort, in collaboration with the Indonesian Ministry of Law and Human Rights. Researcher analyzed the implementation of the CEGAH Project in Indonesia as a social development effort in accordance with the United States mission. To understand this phenomenon, the concept of foreign policy by K.J. Holsti and the concept of Democracy by Larry Diamond are used to see the scale of the success of the policy. In addition, the concept of corruption by Max Weber is also used to understand the culture of corruption that develops in society. This qualitative research obtained data through related parties such as USAID and the Ministry of Law and Human Rights. Other secondary data obtained from journals, books and online media. The results showed that of the three goals to be achieved through the CEGAH Project, community initiatives towards accountability increased rapidly, while the effectiveness of the justice sector and corruption prevention agencies in Indonesia experienced little progress.

Keyword : United States of America, Anti Corruption, USAID, Indonesia, CEGAH

Pembimbing 1



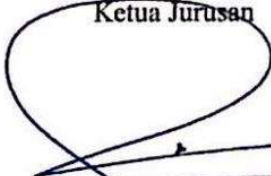
Dra. Retno Susilowati,MM
NIP. 195905201985032003

Pembimbing 2



Khairunnas, S.IP., M.I.Pol
NIDN. 0011059403

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M.SI
NIP.197705122003121003

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul **“Implementasi Kerjasama Bilateral Kementerian Hukum dan HAM RI Dan *United States Agency International Development (USAID)* Dalam Memperkuat Sistem Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia”** ini dengan tepat waktu. Tujuan dari penyusunan Laporan ini adalah sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan Pendidikan sarjana pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.

Selama menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini penulis banyak sekali mendapat bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua di rumah yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan masukan yang sangat berarti kepada saya. Penulis sangat mencintainya dan berjanji akan menjadi anak yang selalu bisa membanggakan.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM selaku dosen Pembimbing I yang juga membimbing dan mengajarkan saya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

5. Bapak Khairunnas, S.IP., M.I.POL selaku dosen Pembimbing II yang selalu memberikan masukan dan arahan serta nasehat dan semangat tanpa henti kepada saya sehingga skripsi ini menjadi lebih baik dan selesai serta terwujud.
6. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak saran dan masukan terkait perkuliahan.
8. Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA dan Ibu Cynthia Azhara Putri, SH., M.Kn selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang berarti pada saat seminar proposal hingga ujian komprehensif.
9. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya.
10. Admin Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah banyak membantu peneliti dalam mengurus administrasi kampus dan diluar kampus selama masa perkuliahan.
11. Seluruh jajaran staff Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM bagian Kerjasama Luar Negeri yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan memberikan saran serta masukan selama pengerjaan skripsi.

12. Untuk teman saya M Dheo Dilla Pratama yang menjadi teman dari awal perkuliahan dimulai dan menjadi teman diskusi skripsi ini dan selalu memberikan masukan, bantuan, serta saran selama pengerjaan skripsi ini.
13. Kepada semua teman-teman dan teman-teman seperjuangan dari Kelas A HI Palembang angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan bantuan secara akademik sejak awal perkuliahan dan telah memberikan dukungan penuh dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Pasangan saya _____ sebagai motivator pribadi yang selalu memberikan dukungan, semangat, waktu, dan tenaga. Semua hal yang diberikan adalah suatu hal yang menolong dan membuat saya tersadar untuk dapat berusaha lebih baik dan bekerja lebih keras.
15. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Saya menyadari bahwa Tugas Akhir Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik Teknik penulisan, bahasa maupun cara pemaparannya. Oleh karena itu saran dan tanggapan dari semua pihak sangat saya harapkan demi kesempurnaan laporan ini.

Saya berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya, dan bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya pada umumnya serta dapat memberi masukan sebagai sumbangan pikiran dalam rangka peningkatan mutu dalam pelajaran.

Palembang,
Hormat Saya,

Muhammad Iffat Mu'afa
NIM 07041381924206

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kerangka Teori	14
2.2.1 Kerjasama Internasional.....	14
2.2.2 Implementasi Kebijakan.....	17
2.3 Alur Pemikiran.....	20
2.4 Argumen Utama	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Desain Penelitian.....	23
3.2 Definisi Konsep.....	24
3.3 Fokus Penelitian	24
3.4 Unit Analisis	30

3.5 Jenis Data dan Sumber Data	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7 Teknik Analisis Data.....	32
3.8 Teknik Keabsahan Data	33
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	36
4.1 Gambaran Umum <i>United State Agency International Development</i>	36
4.2 Visi dan Misi <i>United State Agency International Development</i>	42
4.3 Organisasi dan Struktur <i>United State Agency International Development</i>	46
4.4 Tindak Pecegahan Korupsi di Indonesia	48
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	54
5.1 <i>Interest Affected</i>	54
5.2 <i>Type Of Benefits</i>	57
5.3 <i>Extend Of Change</i>	64
5.4 <i>Site Of Decission Making</i>	67
5.5 <i>Program Implementer</i>	70
5.6 <i>Resources Committed</i>	77
BAB VI PENUTUP	84
6.1 Kesimpulan	84
6.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 3.3 Fokus Penelitian

Tabel 3.9 Jadwal Penelitian

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.3 Alur Pemikiran

DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
USAID	: <i>United State Agency International Development</i>
BDCF	: <i>Bilateral Development Cooperation Framework</i>
EA	: <i>Executing Agency</i>
ICW	: <i>Indonesia Corruption Watch</i>
PK	: Peninjauan Kembali
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
DRG	: <i>Democratic Resilience and Governance</i>
NGO	: <i>Non Government Organization</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
TIPIKOR	: Tindak Pidana Korupsi
UNCAC	: <i>United Nation Convention Against Corruption</i>
GIA	: <i>Grant Implementation Agreement</i>
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
MA	: Mahkamah Agung
KY	: Komisi Yudisial
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
BPKB	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
KPK	: Komisi Pemberantas Korupsi
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
CSO	: <i>Civil Society Organization</i>
SIPP	: Sistem Informasi Penelusuran Perkara
SPPT	: Sistem Peradilan Pidana Terpadu
CARE	: <i>Candidate Acting Registrar Education</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara akan selalu mengutamakan kepentingan negaranya masing-masing, pemerintahan suatu negara akan melakukan banyak hal dan banyak cara agar dapat mensejahterakan rakyatnya. Dalam hal ini suatu negara akan melakukan banyak cara dan terus berupaya agar dapat mencapai kepentingan nasional suatu negara contohnya adalah dengan melakukan pendekatan dan bekerjasama dengan negara lain agar dapat mencapai kepentingan nasional. Sebuah negara tidak dapat berdiri sendiri dengan hanya mengandalkan sumber daya yang negara tersebut miliki tanpa adanya bantuan dari negara lain. Oleh karena itu kerjasama bilateral antar negara dianggap sangat relevan untuk mencapai kepentingan suatu negara. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak negara agar dapat mencapai kepentingan dari masing-masing negara khususnya dalam bidang politik, budaya, dan ekonomi.

Indonesia sebagai suatu negara kesatuan dan berdaulat berhak untuk melakukan kerjasama antar negara. Tercatat hingga april 2019 Indonesia telah melakukan kerjasama bilateral sebanyak 162 kerjasama. Wilayah ini dibagi menjadi delapan wilayah, yaitu Afrika, Timur Tengah, Asia Timur dan Asia Pasifik, Asia Selatan dan Asia Tengah, Amerika Utara dan Amerika Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa Barat dan Eropa Tengah dan Eropa Timur (Siagian, 2020).

Amerika Serikat merupakan negara yang terkenal sebagai negara adi daya dan sangat diperhitungkan untuk dapat menjalin kerjasama dan hubungan baik dalam segala bidang yang dapat menguntungkan bagi negara yang menjalin kerjasama dengan

Amerika Serikat. Hal ini yang mendorong pemerintah Indonesia agar dapat menjalin kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat dalam upaya untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia. Contohnya seperti memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis, upaya antikorupsi, melindungi hak-hak warga negara dan mendukung pemerintah yang mewakili rakyatnya.

Pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat telah sejak lama menjalin kerjasama hubungan diplomatik tercatat sejak 28 Desember 1949 ini dibuktikan dengan pembukaan kedutaan besar di masing-masing negara. Indonesia menjalin hubungan politik dan startegis yang cukup baik dengan Amerika Serikat terutama sejak rezim orde baru berkuasa di Indonesia yaitu paruh kedua dekade 1960an. Hubungan kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat mengalami perubahan sejalan dengan transformasi pembangunan Indonesia. Investasi pemerintah Amerika Serikat sangat penting untuk membantu Indonesia mengatasi kesenjangan pembangunan yang serius dan sudah lama ada. Saat ini Indonesia sudah menunjukkan diri sebagai negara yang memiliki tanggung jawab dan kredibilitas dalam mengatasi berbagai permasalahan penting ditingkat regional maupun global.

Salah satu hasil dari komitmen kerjasama jangka panjang Amerika Serikat dan Indonesia dapat dilihat dari penyediaan bantuan pembangunan dari negara Amerika Serikat kepada Indonesia yang disalurkan melalui *United States Agency for International Development (USAID)* atau Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat. *United State Agency For Internasional Development (USAID)* merupakan sebuah lembaga pemerintahan federal Amerika Serikat yang diresmikan oleh John F. Kennedy sebagai bagian dari undang- undang tentang bantuan luar negeri Amerika

Serikat tahun 1961. USAID menjadi lembaga bantuan asing Amerika Serikat pertama, yang penekanan utamanya terhadap upaya pembangunan ekonomi di Indonesia, USAID bekerja sama dengan pemerintah, tokoh daerah, akademisi, sektor swasta, masyarakat sipil dan para mitra untuk mengetahui tantangan pembangunan.

USAID memusatkan bantuan dalam beberapa bidang yakni; Bidang Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan, Jasa dan Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Inovasi dan Kemitraan. Sampai pada 2016 banyak hal yang sudah USAID jalankan dalam sektor- sektor tersebut diatas. Banyak program yang USAID sudah jalankan bersama-sama dengan pemerintah pusat dan daerah dan berlanjut hingga sampai saat ini (Limbong, 2017). Menteri Luar Negeri yang membawahi Departemen Luar Negeri AS memberikan panduan kebijakan bantuan kepada lembaga USAID agar dapat melaksanakan kewajibannya. Untuk mendorong pembangunan ekonomi, demokrasi, dan kemajuan umat manusia secara umum, USAID berkolaborasi dengan lebih dari 100 negara berkembang. Organisasi ini menerapkan kebijakan luar negeri Amerika dengan membina masyarakat bebas, memperluas penjualan barang, memperluas perdagangan Amerika, dan mendorong kemajuan manusia yang lebih besar dalam skala besar (Husni Mubarak, 2018).

Kerjasama bilateral yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat dalam upaya untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia. Contohnya seperti memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis, upaya antikorupsi, melindungi hak-hak warga negara dan mendukung pemerintah yang mewakili rakyatnya. Dalam upaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut, Indonesia menjalin kerjasama bilateral bersama Amerika Serikat melalui USAID (*United State Agency*

International Development). Salah satu kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat melalui USAID diresmikan melalui penandatanganan BDCF (*Bilateral Development Cooperation Framework*) No. 497 – 040 pada 22 Juli 2020 sebagai dokumen payung kerjasama pembangunan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh kementerian Hukum dan HAM selaku *Executing Agency* (EA) dalam kerjasama bilateral yang dilakukan dengan USAID memiliki beberapa program, salah satu program yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah program “CEGAH”. Program CEGAH berfokus kepada hal program Pencegahan Korupsi.

Korupsi masih menjadi salah satu permasalahan yang sangat besar di Indonesia sampai saat ini. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perkonomian, keuangan negara, moral bangsa yang cenderung sulit untuk ditanggulang. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi telah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat (Tri Wahyu Widiastuti, 2009).

Menurut data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Kejaksaan Agung menangani 371 kasus korupsi sepanjang 2021 dengan 814 tersangka. Jumlah kasus dan tersangka tersebut menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu 2017-2021. Tersangka korupsi yang dijerat Kejaksaan Agung pada 2021 meningkat 61,19% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 505 orang. Angkanya pun merupakan yang tertinggi

selama 2017-2021. Total kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung ditaksir merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan yang didapatkan oleh publik akan menjadi buruk dan mengecewakan publik. Hanya orang yang memiliki uang saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat (Setiadi, 2018).

Salah satu kasus korupsi yang menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia adalah kasus cessie bank bali yang dilakukan oleh terpidana Djoko sugiarto tjandra. Djoko soegiarto tjandra berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009 telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Djoko tjandra telah terbukti melakukan tindakan pidana mulai dari kasus cessie bank bali yang nilainya mencapai Rp 546 Milliar, melakukan pelarian ke luar negeri satu hari sebelum dari putusan pengadilan dan juga terpidana djoko tjandra melakukan suap terhadap salah satu jenderal polisi untuk dapat melakukan penghapusan status *Red Notice* terhadap dirinya hingga menyuap jaksa Pinangki untuk dapat memuluskan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh djoko tjandra meski dirinya masih menyanggang kasus sebagai buronan (Bima Yosua A Tarigan, 2020).

Selanjutnya salah satu kasus yang besar pada saat pandemi covid-19 adalah kasus korupsi bansos atau bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19 KPK menetapkan Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, sebagai tersangka pada 6 Desember 2020 terkait kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan wabah Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2020.

Operasi tangkap tangan KPK pada Jumat, 5 Desember 2020 menjadi dasar penetapan tersangka Juliari saat itu. Juliari malam itu menyerahkan diri ke KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka. Selain Juliari, oknum lain yang diidentifikasi KPK sebagai calon penerima suap antara lain Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian I M, dan Harry Sidabuke. Komisi Pemberantasan Korupsi mengklaim kasus ini bermula pada tahun 2020 dengan adanya program Kementerian Sosial untuk mendapatkan bantuan sosial penanganan Covid-19 berupa paket sembako. Program tersebut bernilai total sekitar Rp 5,9 triliun, dilaksanakan dalam dua periode, dan melibatkan 272 kontrak.

Untuk melaksanakan proyek tersebut dengan memilih langsung mitranya, Juliari yang saat itu menjabat Menteri Sosial menunjuk Matheus dan Adi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Konon disepakati bahwa mitra akan diwajibkan membayar biaya kepada Kementerian Sosial melalui Matheus untuk setiap paket pekerjaan. Tarif yang disepakati Matheus dan Adi adalah Rp10.000 untuk setiap sembako, dari total nilai Rp300.000 untuk setiap paket bansos. Antara Mei dan November 2020, Matheus dan Adi menjalin perjanjian kerja sebagai mitra dengan sejumlah pemasok, antara lain Ardian I M dan Harry Sidabuke serta PT RPI yang konon pemiliknya adalah Matheus (Sahara, 2021).

Pada 24 Januari, Pemerintah Amerika Serikat, melalui *United State Agency International Development* (USAID) mengumumkan program senilai 9,9 juta dolar untuk membantu Indonesia mencegah korupsi dengan meningkatkan keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan mempromosikan integritas di sektor publik dan swasta. USAID Integritas akan membantu Pemerintah Indonesia mengatasi korupsi dengan membantu organisasi masyarakat sipil lokal menangani kerentanan terhadap korupsi sistemik dan konflik kepentingan dalam prosedur perencanaan dan pengadaan.

“Melalui program baru ini, kami mendukung pergeseran fokus Pemerintah Indonesia dari penuntutan dan penegakan hukum terhadap tindakan korupsi menjadi pencegahan korupsi,” kata Direktur USAID Indonesia Jeffery P. Cohen. “Kami melanjutkan kemitraan Pemerintah AS dengan Pemerintah Indonesia, sektor swasta, dan masyarakat Indonesia yang telah berjalan selama beberapa dekade dalam penanganan korupsi di Indonesia.”

Tujuan utama proyek ini adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mengurangi terjadinya praktik konflik kepentingan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Guna melakukan pengawasan dan menumbuhkan sikap menjauhi perbuatan korupsi, maka masyarakat akan dilibatkan dalam kegiatan ini.

Program lima tahun ini dilaksanakan bekerja sama dengan *Partnership for Governance Reform*, sebuah kelompok lokal. Rencana pembangunan jangka menengah pemerintah Indonesia akan tercapai dari segi infrastruktur, stabilitas, dan pertumbuhan yang berkualitas berkat kemitraan ini. Selain itu, dengan mendorong terciptanya undang-undang dan kebijakan antikorupsi yang efisien, berkolaborasi

dengan organisasi terkait, dan melibatkan masyarakat, program ini juga berpegang pada Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Jakarta, 2022).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Upaya Kerjasama Bilateral Pemerintah Indonesia Dan USAID (*United State Agency International Development*) dalam Memperkuat Sistem Tata Kelola Pemerintah Anti Korupsi di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu **“Bagaimana Bentuk dari Implementasi Kerjasama Bilateral Pemerintah Indonesia dan USAID dalam Memperkuat Sistem Tata Kelola Pemerintah Anti Korupsi di Indonesia?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dibalik adanya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui serta menganalisis lebih dalam mengenai bagaimana cara dan strategi dari pemerintah indonesia yang telah bekerja sama dengan *United State Agency International Development (USAID)* dalam hal memperkuat sistem tata Kelola yang berada di indonesia khususnya dalam menangani kasus korupsi.
2. Mengetahui bagaimana jalannya Kerjasama bilateral yang telah dilakukan oleh pemerintah indonesia dan pemerintah amerika serikat untuk kepentingan nasional masing-masing negara.

1.4

Manfaat Peneletian

1. Manfaat Akademis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan ataupun pengetahuan yang bermanfaat agar dapat mengetahui bagaimana sistem tata Kelola suatu negara.

2. Manfaat Praktis

A. Untuk Penulis

Penulis juga berharap dengan adanya penulisan penelitian ini diharapkan jika suatu saat nanti penulis memiliki kesempatan untuk bekerja di institusi pemerintahan, penulis dapat mengerti bagaimana cara untuk mengelola sistem tata pemerintahan dengan baik.

B. Untuk Masyarakat

Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru kepada masyarakat yang kurang mendapatkan informasi mengenai sistem tata Kelola pemerintahan di indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Reisman, R. S. (2020). Final Performance Evaluation of USAID CEGAH. *USAID INDONESIA*, 2.
- ADMINISTRATOR. (2019, September 16). *DPU Kota Semarang*. Retrieved from Smart Insfrastuktur Pekerjaan Umum Kota Semarang: https://dpu.semarangkota.go.id/Main_Content/News/92
- Anggie. (2022, Agustus 11). Retrieved from elib unikom website: https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/535/jbptunikompp-gdl-nopijusaro-26723-6-unikom_n-i.pdf
- Astriani, A. (2020, Januari 10). Retrieved from Mahkamah Agung Web site: [01_Buku_Laplit_2017_Urgensi_&_Mekanisme_Pengembalian_Aset_Hasil_Tindak_Pidana_Korupsi_ISI_TSu_&_TSa_\(1\).pdf](#)
- Bima Yosua A Tarigan, F. A. (2020). Analisis Penerapan Tindak dan Tindakan Administratif. *Journal of law and border protection*, 14-16.
- Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM RI. (2017, September 07). *Kementerian Hukum dan HAM RI*. Retrieved from Kemenkumham.go.id: <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/rapat-komite-teknis-usaid-kemenkumham-ri-bahas-rencana-kerja-tahun-ke-dua-cegah>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, 35-36.
- HARBOWO, N. (Penguatan Lembaga Anti Korupsi Dibutuhkan , April 29). *Penguatan Lembaga Anti Korupsi Dibutuhkan* . Retrieved from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/04/29/penguatan-lembaga-anti-korupsi-dibutuhkan>
- Husni Mubarak, S. Z. (2018). Kontribusi USAID Prioritas. 49.

- Jakarta, U. E. (2022, Januari 25). *Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia*. Retrieved from Kedutaan Besar AS Jakarta: <https://id.usembassy.gov/id/amerika-serikat-bantu-indonesia-cegah-korupsi-melalui-program-usaid-senilai-99-juta-dolar/>
- Limbong, S. (2017). Peranan UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL. *Elib UNIKOM*, 2.
- Management Systems International. (2017). *Work Plan USAID CEGAH*. Jakarta: Tetra Tech Company.
- Management Systems International, a. T. (2016). *USAID CEGAH Work Plan*. Jakarta: United States Agency For International Development.
- Marten Bunga, M. D. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. *Jurnal Law Reform*, 90-93.
- Mulyadi, M. (2011). Penanggulangan tindak pidana korupsi dalam perspektif Criminal Policy. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 219-220.
- Nandha Risky Putra, R. L. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. *Jurnal Anti Korupsi*, 15-21.
- Ridwan. (2014). Upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui peran masyarakat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 396.
- Romli, Y. (2023, 10 11). Wawancara Terkait dengan kerjasama Kemenkumham dan USAID. (M. I. Mu'afa, Interviewer)
- Sahara, W. (2021, 08 23). <https://nasional.kompas.com>. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis>
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia. *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta*, 252.

Siagian, Y. A. (2020). Kepentingan Indonesia dalam kerjasama bilateral. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret*, 50.

Tri Wahyu Widiastuti, S. (2009). Korupsi dan upaya pemberantasannya. *WACANA HUKUM*, 108.

United States Government. (2021, November 17). *United State Agency International Development*. Retrieved from USAID.GOV: <https://www.usaid.gov/id/indonesia/press-release/united-states-and-indonesia-celebrate-joint-efforts-fight-against-corruption>

United States Government. (2022, Januari 25). *United States Agency for International Development*. Retrieved from USAID.GOV: <https://www.usaid.gov/id/indonesia/press-releases/jan-25-2022-united-states-help-indonesia-prevent-corruption-new-five>